

# **PENYUSUNAN RISK REGISTER PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



20

26

Jln. Brigjen Katamso No. 11  
Tlp/Fax (0536) 3224547  
[dp3appkb.kalteng.go.id](http://dp3appkb.kalteng.go.id)

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS<br>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK<br>DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |       |
| Form 2b                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |       |
| Nama Pemda                                                                                                                                                        | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |       |
| Tahun Penilaian                                                                                                                                                   | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |       |
| Periode yang dinilai                                                                                                                                              | : Periode RPJMD Tahun 2025 -2029                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       |
| Urusan Pemerintahan                                                                                                                                               | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |       |
| OPD yang Dinilai                                                                                                                                                  | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                          |                                                                                       |       |
| Sumber Data                                                                                                                                                       | Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026                                                                                                                                                    |                                                                                       |       |
| Tujuan Strategis                                                                                                                                                  | Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera                                                                                                                                                     |                                                                                       |       |
| Sasaran Strategis                                                                                                                                                 | 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah<br>2. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan<br>3. Meningkatkan kualitas hidup dan hak anak<br>4. Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak<br>5. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga |                                                                                       |       |
| IKU Renstra OPD                                                                                                                                                   | IKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                   | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nilai Sakip                                                                           | 80,35 |
|                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                       | 89,15 |
|                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng                            | 4     |
|                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per                                | 18,4  |
|                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak                                            | 14    |
|                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA                        | 78,57 |
|                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                        | 67,55 |
|                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak                                         | 3,48  |
|                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif  | 90    |
|                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif  | 90    |
|                                                                                                                                                                   | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)                                      | 2,23  |
|                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility                       | 38,2  |
|                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)                                     | 57,9  |
|                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)      | 66,41 |
|                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)                                            | 21    |
|                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied) | 88,81 |
|                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)                                                    | 8,44  |
|                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)                         | 8     |
|                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)                                                 | 62,7  |
|                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indeks Lansia Berdaya                                                                 | 62,64 |
|                                                                                                                                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja                                       | 86,88 |
|                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                                       | 26,35 |
|                                                                                                                                                                   | Informasi lain                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |       |



PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG SEKRETARIAT  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nama Pemda                                                                                  | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                      |             |
| Tahun Penilaian                                                                             | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                      |             |
| Periode yang dinilai                                                                        | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                      |             |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                      |             |
| OPD yang Dinilai                                                                            | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                      |             |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                      |             |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                      |             |
| Sasaran Strategis                                                                           | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                      |             |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                      |             |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                          | Indikator                                                            | Target 2026 |
|                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan  |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                      |             |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <b>Program :</b><br>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi<br><b>Kegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah<br><b>Sub Kegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor<br><b>Indikator :</b><br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |                                       |                                                                      |             |

Palangka Raya, 2 Februari 2026  
Sekretaris Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



**SURYANTO, A.K.S., M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP.19730108 199403 1 006

**Formulir Kertas Kerja**

**IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG SEKRETARIAT**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Form 3c

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda            | : Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah                                                                                                           |
| Nama OPD              | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                        |
| Tahun Penilaian       | : 2026                                                                                                                                            |
| Periode yang dinilai  | : 2026                                                                                                                                            |
| Tujuan Strategis      | : Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera |
| Sasaran strategis OPD | : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                                                             |
| Urutan Pemerintahan   | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                         |
| OPD yang Dinilai      | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                        |

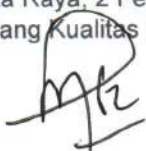
| No | SubKegiatan                           | Indikator Keluaran                                                   | Risiko                                                            |                    |            | Sebab*)                                                                                                     |          | C/UC | Dampak**)                                                                                     |                    |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                       |                                                                      | Uraian                                                            | Kode               | Pemilik    | Uraian                                                                                                      | Sumber   |      | Uraian                                                                                        | Pihak yang Terkena |
|    |                                       |                                                                      |                                                                   | Risiko             |            |                                                                                                             |          |      |                                                                                               |                    |
| a  | b                                     | c                                                                    | e                                                                 | f                  | g          | h                                                                                                           | i        | j    | k                                                                                             | l                  |
| 1  | Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penggunaan uang persediaan untuk keperluan pribadi/pihak tertentu | RFO.26.08.20.06.01 | Sekretaris | Ketidakpatuhan dalam aturan penggunaan UP untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran SKPD | Internal | C    | Keterlambatan Pertanggungjawaban keuangan sehingga GU tertunda menyesuaikan 50% penyerapan UP | ASN/Bidang/Dinas   |

Palangka Raya, 4 Januari 2026  
Sekretaris Dinas PSAPKB Provinsi  
Kalimantan Tengah

  
**SURYANTO, A.K.S., M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP.19730108 199403 1 006

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

|                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nama Pemda                                                                                  | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Tahun Penilaian                                                                             | : 2026                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Periode yang dinilai                                                                        | : 2026                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| OPD yang Dinilai                                                                            | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20246                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatkan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)                                                   | Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        |                                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2026 |
|                                                                                             | 1                                                                                                                                                                            | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                              | Jumlah Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD di Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                            | 4%          |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <b>Program:</b><br>Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                             | <b>Sub Kegiatan :</b><br>Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi<br>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Ge                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                              | Palangka Raya, 2 Februari 2026<br>Plt.Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan<br><br><b>SURYANTO, A.Ks, M.Si</b><br>Pembina Tk I<br>NIP.19730108 199403 1 006 |             |

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

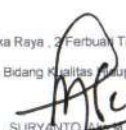
Form 2c

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nama Pemda                                                                                  | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| Tahun Penilaian                                                                             | : 2026                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| Periode yang dinilai                                                                        | : 2026                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| OPD yang Dinilai                                                                            | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatkan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)                                                   | Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/ Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        |                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                               | Target 2026 |
|                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                       | Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik atau hukum atau sosial dan atau ekonomi kewenangan Provinsi                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik atau hukum atau sosial dan atau ekonomi kewenangan Provinsi untuk mendukung indeks pembangunan gender | 1 Dokumen   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                                                                                  | 89,15 %     |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <b>Program:</b><br>Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                             | <b>Sub Kegiatan :</b><br>Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik atau hukum atau sosial dan atau ekonomi kewenangan Provinsi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik atau hukum atau sosial dan atau ekonomi kewenangan Provinsi untuk mendukung indeks pembangunan gender |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | Palangka Raya, 2 Februari 2026<br>Plt.Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan<br><br><b>SURYANTO, A.Ks, M.Si</b><br>Pembina Tk I<br>NIP.19730108 199403 1 006 |                                                                                                                                                                                         |             |

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| Nama Pemda            |                                                                                                                                | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                    |                                              |                                                                                               |           |      |        |                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Nama OPD              |                                                                                                                                | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                                |                                                                                                    |                    |                                              |                                                                                               |           |      |        |                                                               |
| Tahun Penilaian       |                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                    |                                              |                                                                                               |           |      |        |                                                               |
| Periode yang dinilai  |                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                    |                                              |                                                                                               |           |      |        |                                                               |
| Tujuan Strategis      |                                                                                                                                | Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan                                                                                                                                        |                                                                                                    |                    |                                              |                                                                                               |           |      |        |                                                               |
| Sasaran strategis OPD |                                                                                                                                | Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan                                                                                                                                   |                                                                                                    |                    |                                              |                                                                                               |           |      |        |                                                               |
| Urutan Pemerintahan   |                                                                                                                                | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                 |                                                                                                    |                    |                                              |                                                                                               |           |      |        |                                                               |
| OPD yang Dinilai      |                                                                                                                                | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                                |                                                                                                    |                    |                                              |                                                                                               |           |      |        |                                                               |
| No                    | SubKegiatan                                                                                                                    | Indikator Keluaran                                                                                                                                                                      | Risiko                                                                                             |                    |                                              | Sebab*)                                                                                       |           | C/UC | Uraian | Dampak                                                        |
|                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         | Uraian                                                                                             | Kode               | Pemilik                                      | Uraian                                                                                        | Sumber    |      |        |                                                               |
|                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | Risiko             |                                              |                                                                                               |           |      |        | Pihak Yang Terkena                                            |
| 1                     | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                                                       | Tidak dapat menghitung persentase ARG karena SOPD tidak mengumpulkan Program dan kegiatan yang ARG | RFO.25.08.20.01.03 | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP) | SOPD tidak mengumpulkan Program dan Kegiatan yang ARG karena efisiensi anggaran               | Internal  | C    |        | Provinsi Kalimantan Tengah karena target ARG tidak tercapai   |
|                       | Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik atau hukum atau sosial dan atau ekonomi kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik atau hukum atau sosial dan atau ekonomi kewenangan Provinsi untuk mendukung indeks pembangunan gender | Rendahnya partisipasi kerja perempuan terutama di jabatan publik                                   | ROO.25.08.20.01.01 | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP) | ketimpangan signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi | Eksternal | c    |        | Perempuan dan Anak, DP3APPKB serta Provinsi Kalimantan Tengah |

Palangka Raya, 2 Februari Tahun 2026  
Ptt Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan  
  
SURYANTO, A. S.  
Pembina TK.I  
NIP.197301081994031006

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda            | : Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah                                                                                    |
| Nama OPD              | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |
| Tahun Penilaian       | : 2026                                                                                                                     |
| Periode yang dinilai  | : 2026                                                                                                                     |
| Tujuan Strategis      | : Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan                                                                         |
| Sasaran strategis OPD | : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan                                                                    |
| Urusan Pemerintahan   | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                  |
| OPD yang Dinilai      | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |

| No | SubKegiatan                                                                         | Indikator Keluaran                                                                | Risiko                                                                     |                    |                                              | Sebab*)                                                                             |           | C/UC | Dampak**)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                                   | Uraian                                                                     | Kode               | Pemilik                                      | Uraian                                                                              | Sumber    |      | Uraian                                                                                                                                                  | Pihak yang Terkena                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                            | Risiko             |                                              |                                                                                     |           |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Anggaran Responsif Gender pada APBD Belanja Langsung tidak mencapai target | ROO.25.08.20.01.01 | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP) | Kurangnya tenaga terlatih ( Focal point ) untuk menyusun analisi Gender di Tiap OPD | Eksternal | C    | Belum terpenuhinya penganggaran yang Responsif Gender di tiap OPD sehingga Persentase ARG tidak memenuhi target dan hasil pembangunan tidak responsif . | 1. Masyarakat : Perempuan dan laki-laki , anak-anak laki-laki dan Perempuan , Lansia Laki-laki dan Perempuan , Disabilitas Perempuan dan Laki-laki<br>2. Dinas P3APKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota |
|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                            | ROO.25.08.20.01.02 |                                              | Kurangnya pemahaman akan pentingnya Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)      | Eksternal | C    | Masing-masing SOPD masih Kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang Responsif Gender                                                          |                                                                                                                                                                                                        |

Palangka Raya, 2 Februari 2026  
Plt. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

suryanto, A.K.S., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP.19730108 199403 1 005

PENETAPAN KONTEKS FRAUD OPERASIONAL BIDANG DATA DAN INFORMASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nama Pemda                                                                                  | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Tahun Penilaian                                                                             | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Periode yang dinilai                                                                        | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| OPD yang Dinilai                                                                            | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Sasaran Strategis                                                                           | Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2026 |
|                                                                                             | 1 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                                                                                                                   | 1 Dokumen   |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <b>Program :</b><br>Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak<br><b>Kegiatan :</b><br>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi<br><b>Sub Kegiatan :</b><br>Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi<br><b>Indikator :</b><br>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Palangka Raya, 02 Februari 2026<br>Plt. Kepala Bidang Data dan Informasi<br><br><br><b>SYLVANA ANETHE, ST., MT</b><br>Pembina<br>NIP.19731005 199603 2 003 |             |

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG DATA DAN INFORMASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

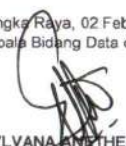
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nama Pemda                                                                                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Tahun Penilaian                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Periode yang dinilai                                                                        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| OPD yang Dinilai                                                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Sasaran Strategis                                                                           | Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2026 |
|                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen   |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <p><b>Program :</b><br/>Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p> <p><b>Kegiatan :</b><br/>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b><br/>Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi</p> <p><b>Indikator :</b><br/>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</p> |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | Palangka Raya, 02 Februari 2026<br>Plt. Kepala Bidang Data dan Informasi<br><br><br><b>SYLVANA ANETHE, ST., MT</b><br>Pembina<br>NIP.19731005 199603 2 003 |             |

Formulir Kertas Kerja  
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG DATA DAN INFORMASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah  
Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun Penilaian : 2026  
Periode yang dinilai : 2026  
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB  
Sasaran strategis OPD : Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

| No | SubKegiatan                              | Indikator Keluaran                                         | Risiko                                                  |                    |                                  | Sebab*)                                                                          |           | Dampak**)                                                                                                                    | Realisasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                        | Link Bukti Dukung |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                          |                                                            | Uraian                                                  | Kode               | Pemilik                          | Uraian                                                                           | Sumber    | Uraian                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    |                                          |                                                            |                                                         | Risiko             |                                  |                                                                                  |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| a  | b                                        | c                                                          | e                                                       | f                  | g                                | h                                                                                | i         | k                                                                                                                            | l                                                                                                                                                                                                                                                              | m                 |
| 1  | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia | Data Gender dan Anak pada Aplikasi SIGA tidak akuntabel | ROO.24.08.20.02.01 | Kepala Bidang Data dan Informasi | Operator Penginputan SIGA di Tingkat Kabupaten/Kota yang selalu berganti /pindah | Eksternal | Kebijakan kurang tepat karena tidak tersedia data yang akurat terkait program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA | Telah dilaksanakan Rakor Forum Data Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kerlebagaan data Provinsi kalimantan Tengah tahun 2025. Dilaksanakan pada tanggal5 November 2025 yang dihadiri peserta dari Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh)SOPD terkait. |                   |
|    |                                          |                                                            | Data Gender dan Anak tidak Handal                       | ROO.24.08.20.02.02 |                                  | Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif sehingga data tidak akurat.       | Eksternal | Kebijakan kurang tepat karena tidak tersedia data yang akurat terkait program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA | Telah dilaksanakan Rakor Forum Data Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kerlebagaan data Provinsi kalimantan Tengah tahun 2025. Dilaksanakan pada tanggal5 November 2025 yang dihadiri peserta dari Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh)SOPD terkait. |                   |

Palangka Raya, 02 Februari 2026  
Pit. Kepala Bidang Data dan Informasi

  
SYLVANA ANDHE, ST., MT  
Pembina  
NIP.19731005 199603 2 003

Keterangan  
Kolom a diisi dengan nomor urut  
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD  
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan  
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan  
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko  
Kolom f diisi dengan Kode risiko  
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko  
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material  
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/ internal)  
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko  
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum  
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

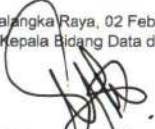
Formulir Kertas Kerja  
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG DATA DAN INFORMASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun Penilaian : 2026  
Periode yang dinilai : 2026  
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB  
Sasaran strategis OPD : Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

| No | SubKegiatan                                                                    | Indikator Keluaran                                                                            | Risiko                                                                                               |                    |                                  | Sebab*)                                                                                                    |          | C/UC | Dampak**)                                                                                                        |                                                                    | Realisasi Tindak Lanjut                                                                    | Link Bukti Dukung |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                |                                                                                               | Uraian                                                                                               | Kode               | Pemilik                          | Uraian                                                                                                     | Sumber   |      | Uraian                                                                                                           | Pihak yang Terkena                                                 |                                                                                            |                   |
|    |                                                                                |                                                                                               |                                                                                                      | Risiko             |                                  |                                                                                                            |          |      |                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                            |                   |
| a  | b                                                                              | c                                                                                             | e                                                                                                    | f                  | g                                | h                                                                                                          | i        | j    | k                                                                                                                | l                                                                  | m                                                                                          | n                 |
| 1  | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Penyalahgunaan wewenang dengan memanipulasi data dalam Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak | RFO.24.08.20.02.01 | Kepala Bidang Data dan informasi | Tindakan untuk memenuhi kondisi objek penilaian data agar sesuai dengan standar yang diinginkan/ditetapkan | Internal | C    | Ketidakakuratan data yang dikumpulkan dan ketidaktepatan dalam analisis data untuk kebutuhan perencanaan program | 1. Masyarakat<br>2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota | Pembuatan Buku Terpilah Gender dan Anak bekerjasama dengan BPS Provinsi Kalimantan Tengah. |                   |

Palangka Raya, 02 Februari 2026  
Pit. Kepala Bidang Data dan Informasi

  
SYLVANA ANTHE, ST., MT  
Pembina  
NIP.19731005 199603 2 003

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                                                                  | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Tahun Penilaian                                                                             | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Periode yang dinilai                                                                        | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| OPD yang Dinilai                                                                            | : Berencana<br>Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)                                                   | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)/Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                               | Target tahun 2026 |
|                                                                                             | 1 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                  | 50 Lembaga        |
|                                                                                             | 2 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                               | 2 Laporan         |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <b>Program:</b><br>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)<br><b>Kegiatan:</b><br>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi<br><b>Sub Kegiatan :</b><br>1. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi<br>2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi<br><b>Indikator:</b><br>1. Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi<br>2. Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Palangka Raya,    Februari 2026<br>Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak<br><br><b>SYLVANA ANETHE, ST., MT</b><br>Pembina<br>NIP.19731005 199603 2 003 |                   |

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD (BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                                                                  | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Tahun Penilaian                                                                             | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Periode yang dinilai                                                                        | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| OPD yang Dinilai                                                                            | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)                                                   | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)/Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                 | Target tahun 2026 |
|                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                                                                                                             | 1 Dokumen         |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <p><b>Program:</b><br/>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p><b>Kegiatan:</b><br/>Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b><br/>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi</p> <p><b>Indikator:</b><br/>Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi</p> |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | Palangka Raya,      Februari 2026<br>Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak<br><br><b>SYLVANA ANETHE, ST., MT</b><br>Pembina<br>NIP.19731005 199603 2 003 |                   |

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD (BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                                                                  | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| Tahun Penilaian                                                                             | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| Periode yang dinilai                                                                        | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| OPD yang Dinilai                                                                            | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)                                                   | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Program Perlindungan Khusus Anak / Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                       | Target tahun 2026 |
|                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                    | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi | 1 Laporan         |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <b>Program:</b><br>Program Perlindungan Khusus Anak<br><b>Kegiatan:</b><br>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br><b>Sub Kegiatan :</b><br>Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi<br><b>Indikator:</b><br>Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Palangka Raya,      Februari 2026<br>Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak<br><br><br><b>SYLVANA ANETHE, ST., MT</b><br>Pembina<br>NIP.19731005 199603 2 003 |                                                                                 |                   |

## Formulir Kertas Kerja

**IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Form 3c

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Penilaian : 2026  
 Periode yang dinilai : 2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi  
 Sasaran strategis OPD : Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif  
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Ditilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

| No | SubKegiatan                                                                                              | Indikator Keluaran                                                                                                                                                     | Risiko                                                                                |             |                                                          | Sebab*)                                                                                                                               |           | C/UC | Dampak**)                                                            |                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | Uraian                                                                                | Kode Risiko | Pemilik                                                  | Uraian                                                                                                                                | Sumber    |      | Uraian                                                               | Pihak yang Terkena                                                                 |
| a  | b                                                                                                        | c                                                                                                                                                                      | e                                                                                     | f           | g                                                        | h                                                                                                                                     | i         | j    | k                                                                    | l                                                                                  |
| 1  | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                    | Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi | Minimnya pencapaian kabupaten/kota yang mendapatkan Predikat minimal Pratama pada KLA |             | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (PPHA) | Minimnya Kapasitas SDM di masing-masing Perangkat Daerah                                                                              | Eksternal | C    | Rendahnya pencapaian Kabupaten/kota yang KLA minimal Tingkat Pratama | Dinas P3APKB Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat, Anak sebagai Objek pelaksanaan KLA |
| 2  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi          | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi                                                              | Minimnya koordinasi dan sinergitas Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).   |             | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (PPHA) | Kurang paham tentang indikator/klaster evaluasi KLA yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota | Eksternal | C    | Rendahnya nilai evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak                   | Dinas P3APKB Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat, Anak sebagai Objek pelaksanaan KLA |
| 3  | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                          | Minimnya keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan melalui Suara Anak (SA)      |             | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (PPHA) | Tidak diberikan ruang dan pelibatan untuk anak menyampaikan pendapat atau suara anak dalam perencanaan pembangunan                    | Internal  | C    | Pemenuhan dan perlindungan anak tidak dapat maksimal                 | DP3APKB Provinsi dan Kab/Kota, Anak.                                               |
| 4  | Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA kewenangan provinsi                               | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA kewenangan provinsi                                                                                        | Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kalimantan Tengah masih tinggi                 |             | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (PPHA) | Kurangnya pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap anak dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan                                    | Eksternal | C    | Tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak                        | Dinas P3APKB Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat, Anak                               |

Palangka Raya, Februari 2026  
 Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

  
 SYLVANA ANETTE, ST., MT  
 Pembina  
 NIP.19731005 199603 2 003

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda            | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                               |
| Nama OPD              | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |
| Tahun Penilaian       | : 2026                                                                                                                     |
| Periode yang dinilai  | : 2026                                                                                                                     |
| Tujuan Strategis      | : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi                                 |
| Sasaran strategis OPD | : Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                 |
| Urusan Pemerintahan   | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                  |
| OPD yang Dinilai      | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |

| No | SubKegiatan                                                                                              | Indikator Keluaran                                                                                                            | Risiko                                                                                  |        |                                                   | Sebab*)                                                                                 |           | C/UC | Dampak**)                                                                                       |                                                      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                          |                                                                                                                               | Uraian                                                                                  | Kode   | Pemilik                                           | Uraian                                                                                  | Sumber    |      | Uraian                                                                                          | Pihak yang Terkena                                   |  |
|    |                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                         | Risiko |                                                   |                                                                                         |           |      |                                                                                                 |                                                      |  |
| a  | b                                                                                                        | c                                                                                                                             | e                                                                                       | f      | g                                                 | h                                                                                       | i         | j    | k                                                                                               | l                                                    |  |
| 1  | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Provinsi tidak sesuai dengan kriteria dan kompetensi |        | Kepala Bidang Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak | Pemilihan pengurus forum anak tidak mengikuti langkah-langkah sesuai juknis/permen PPPA | Eksternal | C    | Pengurus Forum Anak yang terpilih tidak berkopetensi dan menyebabkan kepengurusan menjadi pasif | Dinas P3APPKB Provinsi dan Forum Anak Daerah Kalteng |  |

Palangka Raya,      Februari 2026  
Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

  
SYLVIANA ANETHE, ST., MT  
Pembina  
NIP.19731005 199603 2 003

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                                                                  | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| Tahun Penilaian                                                                             | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| Periode yang dinilai                                                                        | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| OPD yang Dinilai                                                                            | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)                                                   | Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Program Perlindungan Perempuan/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                                 | Target tahun 2026 |
|                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) | 10 Lembaga        |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <b>Program :</b><br>Perlindungan Perempuan<br><b>Kegiatan :</b><br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi<br><b>Sub Kegiatan :</b><br>Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi<br><b>Indikator :</b><br>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Palangka Raya, 02 Februari 2026<br>Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga<br><br>JUMRAH S. ST., M.A.P<br>Pembina<br>NIP. 19710624 199011 2 002 |                                                                                                                                                           |                   |

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA  
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                                                                  | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Tahun Penilaian                                                                             | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Periode yang dinilai                                                                        | : 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Urusan Pemerintahan                                                                         | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| OPD yang Dinilai                                                                            | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Sumber Data                                                                                 | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Tujuan Strategis                                                                            | Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)                                                   | Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                                                                | Program Perlindungan Perempuan/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                    | Target tahun 2025 |
|                                                                                             | 1 Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah)                                                                                                    | 10 Lembaga        |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <b>Program :</b><br>Perlindungan Perempuan<br><b>Kegiatan :</b><br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi<br><b>Sub Kegiatan :</b><br>Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi<br><b>Indikator :</b><br>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Palangka Raya, 02 Februari 2026<br>Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga<br><br>JUMRAH, S.ST., M.A.P<br>Pembina<br>NIP. 19710624 199011 2 002 |                   |

**Formulir Kertas Kerja**  
**IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA**  
**DINAS P3APKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Form 3d

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda            | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                               |
| Nama OPD              | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |
| Tahun Penilaian       | : 2026                                                                                                                     |
| Periode yang dinilai  | : 2026                                                                                                                     |
| Tujuan Strategis      | : Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan                                                                         |
| Sasaran strategis OPD | : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                     |
| Urusan Pemerintahan   | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                  |
| OPD yang Dinilai      | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |

| No | SubKegiatan                                                                                                      | Indikator Keluaran                                                                                                                                        | Risiko                                                                                                                                                                   |                    |                                                            | Sebab*)                                                                                                                                                                                |          | C/UC | Dampak**)                                                                                                                               |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Uraian                                                                                                                                                                   | Kode Risiko        | Pemilik                                                    | Uraian                                                                                                                                                                                 | Sumber   |      | Uraian                                                                                                                                  | Pihak yang Terkena |
| a  | b                                                                                                                | c                                                                                                                                                         | e                                                                                                                                                                        | f                  | g                                                          | h                                                                                                                                                                                      | i        | j    | k                                                                                                                                       | l                  |
| 1  | Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) | Penyalahgunaan Anggaran, Pengadaan Fiktif, dan Ketidakefektifan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan | RFO.25.08.20.04.03 | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga | Ketidakpatuhan administratif keuangan dan pelaporan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan | Internal | C    | Pelaksanaan Kegiatan tidak Efektif Sehingga Menyebabkan Minimnya Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Tersedia | Perempuan dan anak |

Palangka Raya, 02 Februari 2026  
Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga



## Formulir Kertas Kerja

**IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Form 3c

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda            | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                               |
| Nama OPD              | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |
| Tahun Penilaian       | : 2026                                                                                                                     |
| Periode yang dinilai  | : 2026                                                                                                                     |
| Tujuan Strategis      | : Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan                                                                         |
| Sasaran strategis OPD | : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                     |
| Urutan Pemerintahan   | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                  |
| OPD yang Dinilai      | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |

| No | SubKegiatan                                                                                                      | Indikator Keluaran                                                                                                                                        | Risiko                                                                                                             |                    |                                                            | Sebab*)                                                                                                          |          | C/UC | Dampak**)                                                                       |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Uraian                                                                                                             | Kode               | Pemilik                                                    | Uraian                                                                                                           | Sumber   |      | Uraian                                                                          | Pihak yang Terkena |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Risiko             |                                                            |                                                                                                                  |          |      |                                                                                 |                    |
| a  | b                                                                                                                | c                                                                                                                                                         | e                                                                                                                  | f                  | g                                                          | h                                                                                                                | i        | j    | k                                                                               | l                  |
| 1  | Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) | Keterbatasan Anggaran Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan | ROO.25.08.20.04.01 | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga | Pemotongan Anggaran Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan | Internal | C    | Minimnya Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Tersedia | Perempuan dan anak |

Palangka Raya, 02 Februari 2026  
 Pjt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan  
 Kualitas Keluarga



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                             |                                                                                      |                   |
| Tahun Penilaian                           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                   |                                                                                      |                   |
| Periode yang dinilai                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Periode RPJMD Tahun 2025-2029                                                                                                                          |                                                                                      |                   |
| Urusan Pemerintahan                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                |                                                                                      |                   |
| OPD yang Dinilai                          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                               |                                                                                      |                   |
| Sumber Data                               | Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
| Tujuan Strategis                          | Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
| Sasaran Strategis (tebalkan yang dipilih) | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah<br>2. Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Perempuan<br>3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak<br>4. Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak<br><b>5. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja              | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)<br>Program Pengendalian Penduduk (PP)<br>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator                                                                            | Target tahun 2026 |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal               | Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>                             | 2.23              |
|                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-29 Tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i> ) | 38.2              |
|                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                          | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                    | 57.9              |
|                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                               |                                                                                      |                   |
|                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                                                      |                                                                                      |                   |
|                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi                                                                              |                                                                                      |                   |

Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)

|                |                                                                                                                              |                                                                                                |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7              | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                   | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)                | 66.41 |
| 8              | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)                                                     | 21    |
| 9              | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB              | Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern ( <i>Demand Satisfied</i> ) | 88.81 |
| 10             | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                    | Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)                                                             | 8.44  |
| 11             | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                   | Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)                                 | 8     |
| 12             | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                  | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                          | 62.7  |
| 13             | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas           | Indeks Lansia Berdaya                                                                          | 62.64 |
|                | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                               | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja                                                | 86.88 |
| 14             | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                       |                                                                                                |       |
| 15             | Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas    | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                                                | 26.35 |
| 16             | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                     |                                                                                                |       |
| 17             | Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                                                             |                                                                                                |       |
| Informasi Lain |                                                                                                                              |                                                                                                |       |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <p>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>Program Pengendalian Penduduk (PP)</p> <p>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pengembangan Desain</p> <p>Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program</p> <p>Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>Advokasi dan Sosialisasi GDPK</p> <p>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan</p> <p>Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi</p> <p>Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan</p> <p>Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana</p> <p>Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana</p> <p>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</p> <p>Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja</p> <p>Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)</p> <p>Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas</p> <p>Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</p> <p>Indikator :</p> <p>Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan</p> <p>Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga</p> |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Palangka Raya, Januari 2026  
Plt Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

  
WILNA SILVANY, SE.  
NIP. 19880407 201101 2 003

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

|                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nama Pemda                           | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                           |                                                                                                |             |
| Tahun Penilaian                      | : 2026                                                                                                                                                 |                                                                                                |             |
| Periode yang dinilai                 | : 2026                                                                                                                                                 |                                                                                                |             |
| Urusan Pemerintahan                  | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                              |                                                                                                |             |
| OPD yang Dinilai                     | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                             |                                                                                                |             |
| Sumber Data                          | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                |                                                                                                |             |
| Tujuan Strategis                     | Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera        |                                                                                                |             |
| Sasaran Strategis                    | Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga                                                                                                       |                                                                                                |             |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja         | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                                                           |                                                                                                |             |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih) | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator                                                                                      | Target 2026 |
|                                      | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal               | Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>                                       | 2.23        |
|                                      | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-29 Tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i> )           | 38.2        |
|                                      | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                          | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                              | 57.9        |
|                                      | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                               |                                                                                                |             |
|                                      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                                                      |                                                                                                |             |
|                                      | Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi                                                                              |                                                                                                |             |
|                                      | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                                             | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )       | 66.41       |
|                                      | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                           | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)                                                     | 21          |
|                                      | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                            | Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern ( <i>Demand Satisfied</i> ) | 88.81       |
|                                      | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                              | Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)                                                             | 8.44        |

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko

|  |                                                                                                                           |                                                                |       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
|  | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                | Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) | 8     |
|  | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota               | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                          | 62.7  |
|  | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas        | Indeks Lansia Berdaya                                          | 62.64 |
|  | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                            | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja                | 86.88 |
|  | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                    |                                                                |       |
|  | Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                | 26.35 |
|  | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                  |                                                                |       |
|  | Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                                                          |                                                                |       |

**PROGRAM**

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)  
Program Pengendalian Penduduk (PP)  
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

**KEGIATAN :**

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk  
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal  
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB  
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**SUB KEGIATAN :**  
Advokasi dan Sosialisasi GDPK  
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan  
Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi  
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal  
Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan  
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana  
Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal  
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB  
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana  
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja  
Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan  
program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)  
Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas  
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota  
Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Indikator :  
Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan  
Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga

Palangka Raya, Januari 2026  
Plt. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

  
**WILNA SILVANY, SE.**  
**NIP. 19880407 201101 2 003**

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

| Nama Pemda            |                                                                                                                                          | : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                           |                                                                                                                       |                          |                                                              |                                                                                            |          |      |                                                                                             |                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nama OPD              |                                                                                                                                          | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                        |                                                                                                                       |                          |                                                              |                                                                                            |          |      |                                                                                             |                                                 |
| Tahun Penilaian       |                                                                                                                                          | : 2026                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                          |                                                              |                                                                                            |          |      |                                                                                             |                                                 |
| Periode yang dinilai  |                                                                                                                                          | : 2026                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                          |                                                              |                                                                                            |          |      |                                                                                             |                                                 |
| Tujuan Strategis      |                                                                                                                                          | : Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera |                                                                                                                       |                          |                                                              |                                                                                            |          |      |                                                                                             |                                                 |
| Sasaran strategis OPD |                                                                                                                                          | : Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga                                                                                                |                                                                                                                       |                          |                                                              |                                                                                            |          |      |                                                                                             |                                                 |
| Urutan Pemerintahan   |                                                                                                                                          | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                         |                                                                                                                       |                          |                                                              |                                                                                            |          |      |                                                                                             |                                                 |
| OPD yang Dinilai      |                                                                                                                                          | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                        |                                                                                                                       |                          |                                                              |                                                                                            |          |      |                                                                                             |                                                 |
| No                    | SubKegiatan                                                                                                                              | Indikator Keluaran                                                                                                                                | Risiko                                                                                                                |                          |                                                              | Sebab*)                                                                                    |          | C/UC | Dampak**)                                                                                   |                                                 |
|                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Uraian                                                                                                                | Kode                     | Pemilik                                                      | Uraian                                                                                     | Sumber   |      | Uraian                                                                                      | Pihak yang Terkena                              |
|                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | Risiko                   |                                                              |                                                                                            |          |      |                                                                                             |                                                 |
| a                     | b                                                                                                                                        | c                                                                                                                                                 | e                                                                                                                     | f                        | g                                                            | h                                                                                          | i        | j    | k                                                                                           | l                                               |
| 1                     | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                            | Dokumen hasil advokasi dan sosialisasi GDPK                                                                                                       | Potensi manipulas atau rekayasa dokumen advokasi dan sosialisasi GDPK agar terlihat telah dilaksanakan sesuai target. | ROO.26.2.14.02.1.01.0021 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Lemahnya pengawasan pelaksanaan kegiatan                                                   | Internal | C    | Laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan menurunkan kredibilitas pelaksanaan GDPK. | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat  |
| 2                     | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                 | Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                            | Risiko penyusunan dokumen GDPK secara formalitas tanpa proses partisipatif yang memadai.                              | ROO.26.2.14.02.1.01.0022 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Tekanan pemenuhan target dokumen<br><br>Kurangnya pengendalian mutu penyusunan             | Internal | C    | Dokumen GDPK tidak digunakan secara optimal sebagai dasar kebijakan.                        | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota,             |
| 3                     | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                                        | Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                                   | Pemalsuan atau penggelembungan laporan hasil pembinaan dan pengawasan.                                                | ROO.26.2.14.02.1.01.0023 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Sistem pelaporan berbasis dokumen tanpa validasi lapangan<br><br>Pengawasan internal lemah | Internal | C    | Data tidak akurat dan pengambilan keputusan menjadi tidak tepat.                            | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota,             |
| 4                     | Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi                                                                | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan                  | Risiko klaim kerja sama fiktif atau tidak aktif.                                                                      | ROO.26.2.14.02.1.01.0026 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Tidak adanya evaluasi keberlanjutan kerja sama<br><br>Bukti kerja sama tidak diverifikasi  | Internal | C    | Sinergi kebijakan tidak berjalan meskipun dilaporkan tercapai.                              | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat  |
| 5                     | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Jumlah jenis materi promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                         | Risiko pengadaan atau penyusunan materi promosi yang tidak sesuai spesifikasi namun tetap dilaporkan sesuai target.   | ROO.26.2.14.03.1.01.0007 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Kurangnya reviu substansi dan kualitas materi<br><br>Pengawasan terbatas                   | Internal | C    | Materi tidak efektif dan anggaran tidak memberikan manfaat optimal.                         | 1. Masyarakat<br>3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                 |                          |                                                              |                                                                 |          |   |                                                             |                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6  | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                              | Dokumen kegiatan Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                         | Risiko pelaporan kegiatan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan.                   | ROO.26.2.14.03.1.01.0009 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Pemantauan lapangan terbatas<br>Bukti pelaksanaan administratif | Internal | C | Target penurunan kehamilan tidak diinginkan tidak tercapai. | Dinas P3APKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |
| 7  | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                           | Dokumen Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana               | Dokumen kerja sama dibuat tanpa implementasi nyata.                             | ROO.26.2.14.03.1.01.0010 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Lemahnya monitoring pelaksanaan kerja sama                      | Internal | C | Efektivitas program Bangga Kencana menurun.                 | Dinas P3APKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Mitra Kerja |
| 8  | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Risiko pelaporan penggunaan media yang tidak sesuai realisasi.                  | ROO.26.2.14.03.1.01.0011 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Tidak dilakukan pengecekan fisik media                          | Internal | C | Pesan KIE tidak menjangkau sasaran.                         | Dinas P3APKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |
| 9  | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                            | Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                         | Risiko pencantuman peran serta ormas secara administratif tanpa kegiatan nyata. | ROO.26.2.14.03.1.02.0002 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Verifikasi peran ormas terbatas                                 | Internal | C | Pelayanan dan pembinaan KB tidak optimal.                   | Dinas P3APKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |
| 10 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                                             | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                          | Jejaring kemitraan hanya bersifat formalitas dokumen.                           | ROO.26.2.14.03.1.02.0004 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Tidak ada evaluasi keberlanjutan kemitraan                      | Internal | C | Dukungan terhadap program tidak maksimal.                   | Dinas P3APKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Mitra Kerja |
| 11 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                     | Jumlah dokumen hasil Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas            | Pelaporan kegiatan penyuluhan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan.               | ROO.26.2.14.04.1.01.0016 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Minimnya pengawasan lapangan                                    | Internal | C | Kesadaran keluarga tidak meningkat signifikan.              | Dinas P3APKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Mitra Kerja |
| 12 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                                                 | Jumlah Dokumen Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                              | Risiko penggelembungan laporan pembinaan.                                       | ROO.26.2.14.04.1.01.0020 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Sistem pelaporan tidak berbasis eviden lapangan                 | Internal | C | Program tidak berdampak nyata pada sasaran.                 | Dinas P3APKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |

|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                        |                          |                                                              |                                        |          |   |                                                     |                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 13 | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota               | Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                       | Risiko pelaporan kegiatan advokasi yang tidak sepenuhnya dilaksanakan. | ROO.26.2.14.04.1.01.0022 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Validasi bukti kegiatan terbatas       | Internal | C | Pemanfaatan iBangga dalam kebijakan rendah.         | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota,            |
| 14 | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                            | Jumlah dokumen Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                            | Dokumen pembinaan dibuat tanpa dampak nyata di lapangan.               | ROO.26.2.14.04.1.01.0028 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Kurangnya monitoring kegiatan          | Internal | C | Upaya peningkatan kualitas anak tidak optimal.      | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat |
| 15 | Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah dokumen Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | Risiko fasilitasi hanya bersifat administratif.                        | ROO.26.2.14.04.1.02.0006 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Koordinasi teknis terbatas             | Internal | C | Program tidak merata antar daerah.                  | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat |
| 16 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                  | Jumlah dokumen Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                  | Risiko laporan fasilitasi tidak sesuai realisasi.                      | ROO.26.2.14.04.1.02.0007 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Pengawasan lapangan terbatas           | Internal | C | Tujuan peningkatan ekonomi keluarga tidak tercapai. | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat |
| 17 | Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                                                          | Jumlah dokumen Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                                                          | Risiko pendampingan dilaporkan tetapi tidak dilaksanakan optimal.      | ROO.26.2.14.04.1.02.0011 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Keterbatasan pendamping dan monitoring | Internal | C | Program pemberdayaan tidak berkelanjutan.           | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat |

Palangka Raya, Januari 2026  
Plt. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

  
WILNASILVANY, SE.  
NIP. 19880407 201101 2 003

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

|                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                | :                                                                                                                                                                                        | Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                   |
| Tahun Penilaian                           | :                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                   |
| Periode yang dinilai                      | :                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                   |
| Urutan Pemerintahan                       | :                                                                                                                                                                                        | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                           |                                                                                                                                                       |                   |
| OPD yang Dinilai                          | :                                                                                                                                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah          |                                                                                                                                                       |                   |
| Sumber Data                               | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                   |
| Tujuan Strategis                          | Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                   |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih) | Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja              | - Program Perlindungan Perempuan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                   |
|                                           | - Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                   |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)      |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                             | Target tahun 2026 |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                        | Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                      | Dokumen Pelaksanaan Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                      | 1 Dokumen         |
|                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Jumlah Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                                   | 5 Orang           |
|                                           | 2                                                                                                                                                                                        | Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota         | Dokumen Pelaksanaan Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota         | 1 Dokumen         |
|                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Jumlah Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                      | 10 Orang          |
|                                           | 3                                                                                                                                                                                        | Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota               | Dokumen Pelaksanaan Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota               | 1 Dokumen         |
|                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Jumlah Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                            | 1 Tahun           |
|                                           | 4                                                                                                                                                                                        | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi          | Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                      | 1 Dokumen         |
|                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                       | 80 Orang          |
|                                           | 5                                                                                                                                                                                        | layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Dokumen Pelaksanaan layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Dokumen         |
|                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Jumlah layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota              | 100 Orang         |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <p>Program :<br/>Perlindungan Perempuan</p> <p>Kegiatan :<br/>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :<br/>1. Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota<br/>2. Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota<br/>3. Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota<br/>4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi<br/>5. layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Indikator :<br/>1. Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan.<br/>2. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</p> |

Palangka Raya, 3 Februari 2026  
Kepala UPT-PPA



JUMRAH, S.ST., M.A.P  
Pembina  
NIP. 19710624 199011 2 002

**Formulir Kertas Kerja**  
**IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Form 3c

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Penilaian : 2026  
 Periode yang dinilai : 2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan  
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif  
 Jurusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

| No | SubKegiatan                                                                                                               | Indikator Keluaran                                                                                                                            | Risiko                                                                                                                                                                                                                          |                    |                | Sebab*)                                                                                                      |           | C/UC | Dampak**)                                                                                                                                      |                            | TINDAK LANJUT |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                               | Uraian                                                                                                                                                                                                                          | Kode               | Pemilik        | Uraian                                                                                                       | Sumber    |      | Uraian                                                                                                                                         | Pihak yang Terkena         | REALISASI     | Bukti Dukung |
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | Risiko             |                |                                                                                                              |           |      |                                                                                                                                                |                            |               |              |
| a  | b                                                                                                                         | c                                                                                                                                             | e                                                                                                                                                                                                                               | f                  | g              | h                                                                                                            | i         | j    | k                                                                                                                                              | l                          | m             | n            |
| 1  | Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota              | Dokumen Pelaksanaan Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota              | Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penanganan dan rujukan kasus perempuan korban kekerasan akibat keterbatasan koordinasi, data kasus, dan kapasitas pelaksana layanan di tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota. | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
|    |                                                                                                                           | Jumlah Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                           | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                                                                                                                    | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
| 2  | Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | Dokumen Pelaksanaan Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi                                                                                                                                                          | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap           | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
|    |                                                                                                                           | Jumlah Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota              | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                                                                                                                    | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
| 3  | Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota       | Dokumen Pelaksanaan Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota       | Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi                                                                                                                                                     | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban                              | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
|    |                                                                                                                           | Jumlah Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                    | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                                                                                                                    | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |               |              |

|   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                    |                |                                                                                                              |           |   |                                                                                                                                                |                            |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 4 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                 | Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                      | Keterbatasan kompetensi dan keberlanjutan SDM lembaga layanan yang berpotensi menurunkan kualitas penanganan perempuan korban kekerasan. | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |  |  |
|   | Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi          | Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                       | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                             | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |  |  |
| 5 | layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota        | Dokumen Pelaksanaan layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi                                                              | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |  |  |
|   | Jumlah layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota              | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                             | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |  |  |

Palangka Raya, 03 Februari 2026

Kepala UPT-PPA



PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD UPT-PPA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

|                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
| Tahun Penilaian                           | : 2026                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
| Periode yang dinilai                      | : 2026                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
| Urusan Pemerintahan                       | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
| OPD yang Dinilai                          | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
| Sumber Data                               | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
| Tujuan Strategis                          | Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih) | Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja              | - Program Perlindungan Perempuan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
|                                           | - Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)      |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator                                                                                      | Target tahun 2026 |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                        | Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                      | Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 5 Orang           |
|                                           | 2                                                                                                                                                                                        | Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota         | Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 10 Orang          |
|                                           | 3                                                                                                                                                                                        | Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota               | Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 1 Tahun           |
|                                           | 4                                                                                                                                                                                        | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi          | Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 80 Orang          |
|                                           | 5                                                                                                                                                                                        | layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 100 Orang         |
| Informasi Lain                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                |                   |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko</p> | <p>Program :<br/>Perlindungan Perempuan<br/>Kegiatan :<br/>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br/>Sub Kegiatan :<br/>1. Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota<br/>2. Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota<br/>3. Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota<br/>4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi<br/>5. layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota<br/>Indikator :<br/>1. Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan.<br/>2. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Palangka Raya, 3 Februari 2026<br/>Kepala UPT-PPA</p> <div data-bbox="915 799 1284 1111"><p>JUMRAH, S.ST., M.A.P<br/>Pembina<br/>NIP. 19710624 199011 2 002</p></div> |

Formulir Kertas Kerja  
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda            | Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                               |
| Nama OPD              | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |
| Tahun Penilaian       | 2026                                                                                                                     |
| Periode yang dinilai  | 2026                                                                                                                     |
| Tujuan Strategis      | Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan                                                            |
| Sasaran strategis OPD | Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                     |
| Urutan Pemerintahan   | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                  |
| OPD yang Dinilai      | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |

| No | SubKegiatan                                                                                                               | Indikator Keluaran                                                                                                                            | Risiko                                                                                                                                                                                                                          |                    |                | Sebab*)                                                                                                      |           | C/UC | Dampak**)                                                                                                                                      |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                               | Uraian                                                                                                                                                                                                                          | Kode               | Pemilik        | Uraian                                                                                                       | Sumber    |      | Uraian                                                                                                                                         | Pihak yang Terkena         |
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | Risiko             |                |                                                                                                              |           |      |                                                                                                                                                |                            |
| a  | b                                                                                                                         | c                                                                                                                                             | e                                                                                                                                                                                                                               | f                  | g              | h                                                                                                            | i         | j    | k                                                                                                                                              | l                          |
| 1  | Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota              | Dokumen Pelaksanaan Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota              | Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penanganan dan rujukan kasus perempuan korban kekerasan akibat keterbatasan koordinasi, data kasus, dan kapasitas pelaksana layanan di tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota. | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|    |                                                                                                                           | Jumlah Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                           | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                                                                                                                    | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |
| 2  | Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | Dokumen Pelaksanaan Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi                                                                                                                                                     | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|    |                                                                                                                           | Jumlah Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota              | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                                                                                                                    | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |

|   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                    |                |                                                                                                              |           |   |                                                                                                                                                |                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3 | Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota               | Dokumen Pelaksanaan Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota               | Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi                                                              | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|   |                                                                                                                                   | Jumlah Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota                            | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                             | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi          | Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                      | Keterbatasan kompetensi dan keberlanjutan SDM lembaga layanan yang berpotensi menurunkan kualitas penanganan perempuan korban kekerasan. | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|   |                                                                                                                                   | Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                       | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                             | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |
| 5 | layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Dokumen Pelaksanaan layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi                                                              | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|   |                                                                                                                                   | Jumlah layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota              | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA                                                                             | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                              | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                     | Masyarakat yang melaporkan |

Palangka Raya, 2 Februari 2026

Kepala UPT-PPA



Formulir Kertas Kerja  
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD UPT-PPA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Penilaian : 2026  
 Periode yang dinilai : 2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan  
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif  
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

| URD yang Diteliti                                   |                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                   |                    |                |                                                                                               |          |      |                                                                                   |                    |               |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep |                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                   |                    |                |                                                                                               |          |      |                                                                                   |                    |               |              |
| No                                                  | SubKegiatan                                                                                                  | Indikator Keluaran                                                                             | Risiko                                                                                                                                            |                    |                | Sebab*)                                                                                       |          | C/UC | Dampak**)                                                                         |                    | TINDAK LANJUT |              |
|                                                     |                                                                                                              |                                                                                                | Uraian                                                                                                                                            | Kode Risiko        | Pemilik        | Uraian                                                                                        | Sumber   |      | Uraian                                                                            | Pihak yang Terkena | REALISASI     | BUKTI DUKUNG |
|                                                     |                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                   | Risiko             |                |                                                                                               |          |      |                                                                                   |                    |               |              |
| a                                                   | b                                                                                                            | c                                                                                              | e                                                                                                                                                 | f                  | g              | h                                                                                             | i        | j    | k                                                                                 | l                  | m             | n            |
| 1                                                   | Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | Pelaksanaan Perlindungan Korban Kekerasan pada Rumah Perlindungan yang ditentukan tidak sesuai SOP Layanan penampungan Sementara Korban Kekerasan | RFO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT PPA | Kelalaian dalam memantau kondisi korban kekerasan selama ditempatkan dalam Rumah Perlindungan | Internal | C    | Terjadinya kekerasan ataupun penelantaran oleh petugas penjaga Rumah perlindungan | Korban kekerasan   |               |              |

Palangka Raya, 3 Februari 2026  
Kepala UPT-PPA



Formulir Kertas Kerja  
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Penilaian : 2026  
 Periode yang dinilai : 2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Perlindungan AMPK  
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara kimprehensif  
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

| No | SubKegiatan                                                                                                               | Indikator Keluaran                                                                                                                | Risiko                                                                 |                    |                | Sebab*)                                                                                                 |           | C/UC | Dampak**)                                                                                                                                 |                            | TINDAK LANJUT |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                   | Uraian                                                                 | Kode Risiko        | Pemilik        | Uraian                                                                                                  | Sumber    |      | Uraian                                                                                                                                    | Pihak yang Terkena         | REALISASI     | Bukti Dukung |
| a  | b                                                                                                                         | c                                                                                                                                 | e                                                                      | f                  | g              | h                                                                                                       | i         | j    | k                                                                                                                                         | l                          | m             | n            |
| 1  | Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                            | Dokumen Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                            | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan Anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
|    |                                                                                                                           | Jumlah Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                             | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA           | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                         | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
| 2  | Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota         | DokumenLayanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota          | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap Anak | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan Anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
|    |                                                                                                                           | Jumlah Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota          | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA           | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                         | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
| 3  | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota | Dokumen Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap Anak | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan Anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |               |              |
|    |                                                                                                                           | Jumlah Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota  | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA           | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                         | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |               |              |

|   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                        |                    |                |                                                                                                         |           |   |                                                                                                                                           |                            |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 4 | Layanan Pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota       | Dokumen Layanan Pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                   | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |  |  |
|   |                                                                                                                              | Jumlah Layanan Pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                    | Ancaman peaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA            | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                         | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |  |  |
| 5 | Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                    | Dokumen Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                                | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |  |  |
|   |                                                                                                                              | Jumlah Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                                 | Ancaman peaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA            | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                         | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |  |  |
| 6 | layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Dokumen Pelaksanaan layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap Anak | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |  |  |
|   |                                                                                                                              | Jumlah layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota              | Ancaman peaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA            | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                         | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |  |  |

Pelangka Raya, 03 Februari 2026  
Kepala UPT-PPA

  
JUMRAH, S.S., M.A.P.  
Pemba  
NIP. 19710624 199011 2 002



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

|                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                   | :                                                                                                                                                         | Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                  |                                                                                                                                   |                   |
| Tahun Penilaian                              | :                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                   |
| Periode yang dinilai                         | :                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                   |
| Urusan Pemerintahan                          | :                                                                                                                                                         | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                     |                                                                                                                                   |                   |
| OPD yang Dinilai                             | :                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana<br>Provinsi Kalimantan Tengah |                                                                                                                                   |                   |
| Sumber Data                                  | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana<br>Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                   |
| Tujuan Strategis                             | Meningkatkan Kualitas Perlindungan AMPK                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                   |
| Sasaran strategis<br>(tebalkan yang dipilih) | Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja                 | - Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                   |
|                                              | - Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                   |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)         |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator                                                                                                                         | Target tahun 2026 |
|                                              | 1                                                                                                                                                         | Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                              | Dokumen Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                            | 1 Dokumen         |
|                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                             | 2 Lembaga         |
|                                              | 2                                                                                                                                                         | Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota           | Dokumen Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota         | 1 Dokumen         |
|                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota          | 35 Orang          |
|                                              | 3                                                                                                                                                         | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota   | Dokumen Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota | 1 Dokumen         |
|                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota  | 20 Orang          |
|                                              | 4                                                                                                                                                         | Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota      | Dokumen Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota    | 1 Dokumen         |
|                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota     | 10 Orang          |
|                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                   |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                                                                                                                                                                                                                  | Dokumen Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                    | 1 Dokumen |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                     | 5 Orang   |
|                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                               | Dokumen layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Dokumen |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota  | 100 Orang |
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |           |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <p>Program :</p> <p>Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1. Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku</p> <p>2. Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota</p> <p>3. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota</p> <p>4. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota</p> <p>5. Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota</p> <p>6. Layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan.</p> <p>2. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |           |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Palangka Raya, 2 Februari 2026</p> <p>Kepala UPT-PPA</p> <div><p>JUMRAH, S.ST., M.A.P</p><p>Pembina</p><p>NIP. 19710624 199011 2 002</p></div> |                                                                                                                                      |           |

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD UPT-PPA  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

|                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
| Tahun Penilaian                           | : 2026                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
| Periode yang dinilai                      | : 2026                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
| Urusan Pemerintahan                       | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
| OPD yang Dinilai                          | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
| Sumber Data                               | DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
| Tujuan Strategis                          | Meningkatkan Kualitas Perlindungan AMPK                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
| Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih) | Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja              | - Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
|                                           | - Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                     |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |
| Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)      |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator                                                                                                | Target tahun 2026 |
|                                           | 1                                                                                                                                                         | Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                               | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 2 Lembaga         |
|                                           | 2                                                                                                                                                         | Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota            | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 35 Orang          |
|                                           | 3                                                                                                                                                         | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota    | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 20 Orang          |
|                                           | 4                                                                                                                                                         | Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota       | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 10 Orang          |
|                                           | 5                                                                                                                                                         | Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                    | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 5 Orang           |
|                                           | 6                                                                                                                                                         | layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | 100 Orang         |
| Informasi Lain                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                          |                   |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <b>Program :</b><br>Perlindungan Khusus Anak<br><b>Kegiatan :</b><br>Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi<br><b>Sub Kegiatan :</b><br>Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi<br><b>Indikator :</b><br>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Palangka Raya, 3 Februari 2026<br>Kepala UPT-PPA<br><br>JUMRAH, S.ST., M.A.P<br>Pembina<br>NIP. 19710624 199011 2 002 |

Formulir Kertas Kerja  
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

| Nama Pemda            | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                        |                    |                |                                                                                                        |           |      |                                                                                                                                           |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nama OPD              | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |                                                                                                                                   |                                                                        |                    |                |                                                                                                        |           |      |                                                                                                                                           |                            |
| Tahun Penilaian       | : 2026                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                        |                    |                |                                                                                                        |           |      |                                                                                                                                           |                            |
| Periode yang dinilai  | : 2026                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                        |                    |                |                                                                                                        |           |      |                                                                                                                                           |                            |
| Tujuan Strategis      | : Meningkatkan Kualitas Perlindungan AMPK                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                        |                    |                |                                                                                                        |           |      |                                                                                                                                           |                            |
| Sasaran strategis OPD | : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                     |                                                                                                                                   |                                                                        |                    |                |                                                                                                        |           |      |                                                                                                                                           |                            |
| Urutan Pemerintahan   | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                  |                                                                                                                                   |                                                                        |                    |                |                                                                                                        |           |      |                                                                                                                                           |                            |
| OPD yang Dinilai      | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |                                                                                                                                   |                                                                        |                    |                |                                                                                                        |           |      |                                                                                                                                           |                            |
| No                    | SubKegiatan                                                                                                                | Indikator Keluaran                                                                                                                | Risiko                                                                 |                    |                | Sebab*)                                                                                                |           | C/UC | Dampak**)                                                                                                                                 |                            |
|                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                   | Uraian                                                                 | Kode               | Pemilik        | Uraian                                                                                                 | Sumber    |      | Uraian                                                                                                                                    | Pihak yang Terke           |
|                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                        | Risiko             |                |                                                                                                        |           |      |                                                                                                                                           |                            |
| a                     | b                                                                                                                          | c                                                                                                                                 | e                                                                      | f                  | g              | h                                                                                                      | i         | j    | k                                                                                                                                         | l                          |
| 1                     | Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                             | Dokumen Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                            | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan koran kekerasan terhadap anak | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|                       |                                                                                                                            | Jumlah Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku                                             | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA           | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                        | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |
| 2                     | Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota          | DokumenLayanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota          | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan koran kekerasan terhadap anak | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|                       |                                                                                                                            | Jumlah Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota          | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA           | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                        | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |
| 3                     | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota  | Dokumen Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan koran kekerasan terhadap anak | Internal  | C    | Layanan penanganan korban kekerasan anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|                       |                                                                                                                            | Jumlah Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota  | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA           | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                        | Eksternal | C    | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |

|   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                        |                    |                |                                                                                                         |           |   |                                                                                                                                           |                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4 | Layanan Pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota       | Dokumen Layanan Pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                   | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|   |                                                                                                                              | Jumlah Layanan Pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                    | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA           | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                         | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |
| 5 | Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                    | Dokumen Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                                | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|   |                                                                                                                              | Jumlah Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota                                 | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA           | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                         | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |
| 6 | layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Dokumen Pelaksanaan layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Masih terdapat pengaduan kekerasan anak yang bukan kewenangan Provinsi | ROO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT-PPA | Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak | Internal  | C | Layanan penanganan korban kekerasan anak tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal | Masyarakat yang melaporkan |
|   |                                                                                                                              | Jumlah layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota              | Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA           | ROO.24.08.20.07.02 | Kepala UPT-PPA | Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan                                         | Eksternal | C | Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal                                                                                                | Masyarakat yang melaporkan |

Palangka Raya, 3 Februari 2026  
Kepala UPT-PPA



Formulir Kertas Kerja  
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD UPT-PPA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda            | : Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                               |
| Nama OPD              | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |
| Tahun Penilaian       | : 2026                                                                                                                     |
| Periode yang dinilai  | : 2026                                                                                                                     |
| Tujuan Strategis      | : Meningkatkan Kualitas Perlindungan AMPK                                                                                  |
| Sasaran strategis CPD | : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif                                                     |
| Urutan Pemerintahan   | : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                  |
| OPD yang Dinilai      | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah |

| No | SubKegiatan                                                                                                                  | Indikator Keluaran                                                                                       | Risiko                                                                                                                                   |                    |                | Sebab*)                                           |          | C/UC | Dampak**)                                                                                                                                                                                                                                    |                    | TINDAK LANJUT |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|    |                                                                                                                              |                                                                                                          | Uraian                                                                                                                                   | Kode               | Pemilik        | Uraian                                            | Sumber   |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                       | Pihak yang Terkena | REALISASI     | BUKTI DUKUNG |
|    |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                          | Risiko             |                |                                                   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |              |
| a  | b                                                                                                                            | c                                                                                                        | e                                                                                                                                        | f                  | g              | h                                                 | i        | j    | k                                                                                                                                                                                                                                            | l                  | m             | n            |
| 1  | layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota | Keterbatasan layanan pemulihan ramah anak dan koordinasi lintas daerah yang berpotensi menghambat proses pemulihan anak korban kekerasan | RFO.24.08.20.07.01 | Kepala UPT PPA | Kelalaian dalam memantau kondisi korban kekerasan | Internal | C    | Terjadinya ketidakefektifan layanan spesifik pemulihan anak korban kekerasan di tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota akibat keterbatasan SDM profesional, sarana layanan, serta mekanisme rujukan dan pendampingan yang berkelanjutan. | Korban kekerasan   |               |              |

Palangka Raya, 3 Februari 2026

Kepala UPT PPA



Formulir Kertas Kerja  
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

| Nama Pemda<br>: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                              |                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nama OPD<br>: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                              |                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                 |                                                 |
| Tahun Penilaian<br>: 2026                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                              |                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                 |                                                 |
| Periode yang dinilai<br>: 2026                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                              |                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                 |                                                 |
| Tujuan Strategis<br>: Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                              |                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                 |                                                 |
| Sasaran strategis OPD<br>: Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                              |                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                 |                                                 |
| Urutan Pemerintahan<br>: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                              |                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                 |                                                 |
| OPD yang Dinilai<br>: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                              |                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                 |                                                 |
| No                                                                                                                                                                    | SubKegiatan                                                                                                                              | Indikator Keluaran                                                                                                               | Risiko |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                              | Sebab*)                                                                                                                                   |          | C/UC | Dampak**)                                                                                                                                       |                                                 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | Tahap  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                    | Kode Risiko              | Pemilik                                                      | Uraian                                                                                                                                    | Sumber   |      | Uraian                                                                                                                                          | Pihak yang Terkena                              |
| a                                                                                                                                                                     | b                                                                                                                                        | c                                                                                                                                | d      | e                                                                                                                                                                                                                                         | f                        | g                                                            | h                                                                                                                                         | i        | j    | k                                                                                                                                               | l                                               |
| 1                                                                                                                                                                     | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                            | Dokumen hasil advokasi dan sosialisasi GDPK                                                                                      |        | Tidak terlaksananya advokasi dan sosialisasi GDPK secara optimal sehingga dokumen hasil advokasi dan sosialisasi tidak tercapai sesuai target.                                                                                            | ROO.26.2.14.02.1.01.0021 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Belum optimalnya koordinasi lintas sektor<br>- partisipasi pemangku kepentingan rendah<br>- keterbatasan waktu dan anggaran               | Internal | C    | Pemahaman pemangku kepentingan terhadap GDPK rendah sehingga implementasi kebijakan kependudukan tidak optimal                                  | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat  |
| 2                                                                                                                                                                     | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                 | Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                           |        | Dokumen GDPK tingkat provinsi tidak tersusun tepat waktu atau tidak dimanfaatkan secara optimal.                                                                                                                                          | ROO.26.2.14.02.1.01.0022 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Data pendukung tidak lengkap/mutakhir<br><br>Keterbatasan kapasitas teknis penyusunan dokumen<br><br>Sinkronisasi kebijakan belum optimal | Internal | C    | Arah kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tidak jelas dan tidak terintegrasi dalam perencanaan daerah.                                 | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota,             |
| 3                                                                                                                                                                     | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                                        | Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                  |        | Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan tidak berjalan optimal.                                                                                                                                                     | ROO.26.2.14.02.1.01.0023 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Keterbatasan SDM pembina<br><br>Kepatuhan unit pelaksana masih rendah<br><br>Sistem pelaporan belum optimal                               | Internal | C    | Data kependudukan dan program tidak akurat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan.                                                         | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota,             |
| 4                                                                                                                                                                     | Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi                                                                | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan |        | Fasilitasi kerja sama dan sinergi kebijakan tidak berjalan optimal.                                                                                                                                                                       | ROO.26.2.14.02.1.01.0026 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Komitmen stakeholder belum merata<br><br>Perbedaan prioritas antar instansi                                                               | Internal | C    | Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan tidak terintegrasi dan kurang efektif.                                                          | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat  |
| 5                                                                                                                                                                     | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Jumlah jenis materi promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal        |        | tidak tersusunnya atau tidak optimalnya dokumen materi promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi yang sesuai dengan kearifan budaya lokal, baik dari sisi kualitas, ketepatan waktu, maupun kesesuaian substansi. | ROO.26.2.14.03.1.01.0007 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Keterbatasan pemahaman terhadap kearifan budaya lokal                                                                                     | Internal | C    | Dokumen materi promosi dan konseling tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi. | 1. Masyarakat<br>3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng |
| 6                                                                                                                                                                     | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                | Dokumen kegiatan Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                       |        | Kegiatan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan tidak mencapai target.                                                                                                                                                                 | ROO.26.2.14.03.1.01.0009 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Rendahnya pemahaman masyarakat<br><br>Akses layanan KIE terbatas<br><br>Partisipasi sasaran rendah                                        | Internal | C    | Angka kehamilan tidak diinginkan tetap tinggi dan berdampak pada kualitas keluarga.                                                             | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat  |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |  |                                                                                   |                          |                                                              |                                                                          |          |   |                                                                  |                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7  | Facilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana                           | Dokumen Facilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana               |  | Kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja tidak terfasilitasi secara optimal. | ROO.26.2.14.03.1.01.0010 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Komitmen mitra belum berkelanjutan<br>Koordinasi lintas sektor terbatas  | Internal | C | Pelaksanaan advokasi dan KIE Bangsa Kencana tidak maksimal.      | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Mitra Kerja |
| 8  | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal |  | Pemanfaatan media promosi tidak efektif dan tidak sesuai kearifan budaya lokal.   | ROO.26.2.14.03.1.01.0011 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Pemilihan media kurang tepat<br>Keterbatasan anggaran publikasi          | Internal | C | Pesan KIE tidak tersampaikan secara luas dan tepat sasaran.      | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |
| 9  | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                            | Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                         |  | Peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan KB rendah.    | ROO.26.2.14.03.1.02.0002 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Kapasitas organisasi terbatas<br>Dukungan teknis dan pendampingan kurang | Internal | C | Cakupan pelayanan dan pembinaan KB tidak optimal.                | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |
| 10 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana                                                                             | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana                                                          |  | Jejaring kemitraan tidak berkembang dan tidak berkelanjutan.                      | ROO.26.2.14.03.1.02.0004 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Komitmen mitra rendah<br>Koordinasi tidak intensif                       | Internal | C | Dukungan terhadap Program Bangsa Kencana berkurang.              | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Mitra Kerja |
| 11 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                     | Jumlah dokumen hasil Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas            |  | Kesadaran keluarga terhadap perencanaan kehidupan rendah.                         | ROO.26.2.14.04.1.01.0016 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Sosialisasi kurang intensif<br>Faktor sosial budaya                      | Internal | C | Kualitas perencanaan keluarga tidak meningkat.                   | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Mitra Kerja |
| 12 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                                                 | Jumlah Dokumen Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                              |  | Pembinaan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja tidak optimal.         | ROO.26.2.14.04.1.01.0020 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Keterbatasan SDM pembina<br>Jangkauan layanan terbatas                   | Internal | C | Ketahanan keluarga dan remaja tidak meningkat secara signifikan. | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |
| 13 | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                                 |  | Advokasi dan promosi iBangga tidak mencapai target.                               | ROO.26.2.14.04.1.01.0022 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Pemahaman indikator iBangga rendah<br>Sosialisasi terbatas               | Internal | C | Nilai iBangga tidak dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan.        | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |
| 14 | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                                                         | Jumlah dokumen Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                                      |  | Pembinaan program 1000 HPK tidak berjalan optimal.                                | ROO.26.2.14.04.1.01.0028 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Keterbatasan pemahaman keluarga sasaran<br>Dukungan lintas sektor kurang | Internal | C | Kualitas tumbuh kembang anak tidak optimal.                      | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |
| 15 | Facilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas                              | Jumlah dokumen Facilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas           |  | Facilitasi pengembangan program ketahanan keluarga tidak optimal.                 | ROO.26.2.14.04.1.02.0006 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Kapasitas daerah berbeda-beda<br>Koordinasi teknis terbatas              | Internal | C | Implementasi program ketahanan keluarga tidak merata.            | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat              |

|    |                                                                                          |                                                                                                        |  |                                                                |                          |                                                              |                                                     |          |   |                                                              |                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 16 | Facilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah dokumen Fasilitas kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota |  | Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga tidak berkesinambungan. | ROO.26.2.14.04.1.02.0007 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Keterbatasan pendampingan Akses permodalan terbatas | Internal | C | Kemandirian ekonomi keluarga tidak meningkat.                | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat |
| 17 | Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                         | Jumlah dokumen Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                        |  | Pembinaan dan pendampingan tidak berjalan efektif.             | ROO.26.2.14.04.1.02.0011 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas | Jumlah pendamping terbatas Monitoring belum optimal | Internal | C | Program pemberdayaan ekonomi keluarga tidak mencapai tujuan. | Dinas P3APPKB, Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat |

Palangka Raya, Januari 2026  
Pit. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

  
WILNA SILVANY, SE.  
NIP. 19880407 201101 2 003

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nama Pemda                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                             |                                                                                      |                   |
| Tahun Penilaian                           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                   |                                                                                      |                   |
| Periode yang dinilai                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periode RPJMD Tahun 2025-2029                                                                                                                          |                                                                                      |                   |
| Urusan Pemerintahan                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                |                                                                                      |                   |
| OPD yang Dinilai                          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah                               |                                                                                      |                   |
| Sumber Data                               | Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
| Tujuan Strategis                          | Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
| Sasaran Strategis (tebalkan yang dipilih) | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah<br>2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan<br>3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak<br>4. Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak<br>5. <b>Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
| Program/ Kegiatan Unit Kerja              | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)<br>Program Pengendalian Penduduk (PP)<br>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator                                                                            | Target tahun 2026 |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal               | Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>                             | 2.23              |
|                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-29 Tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i> ) | 38.2              |
|                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                          | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                    | 57.9              |
|                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                               |                                                                                      |                   |
|                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                                                      |                                                                                      |                   |

Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)

|    |                                                                                                                              |                                                                                                |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6  | Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi                                                    |                                                                                                |       |
| 7  | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                   | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)                | 66.41 |
| 8  | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)                                                     | 21    |
| 9  | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                  | Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern ( <i>Demand Satisfied</i> ) | 88.81 |
| 10 | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                    | Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)                                                             | 8.44  |
| 11 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                   | Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)                                 | 8     |
| 12 | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                  | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                          | 62.7  |
| 13 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas           | Indeks Lansia Berdaya                                                                          | 62.64 |
|    | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                               | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja                                                | 86.88 |
| 14 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                       |                                                                                                |       |
| 15 | Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas    |                                                                                                |       |

|    |                                                                                          |                                                 |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 16 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri | 26.35 |
| 17 | Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                         |                                                 |       |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Informasi Lain                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | <p>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>Program Pengendalian Penduduk (PP)</p> <p>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</p> <p>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>Advokasi dan Sosialisasi GDPK</p> <p>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan</p> <p>Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi</p> <p>Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan</p> <p>Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana</p> <p>Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana</p> <p>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</p> <p>Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja</p> <p>Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)</p> <p>Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas</p> <p>Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</p> <p>Indikator :</p> <p>Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan</p> <p>Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga</p> |  |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

Palangka Raya,      Januari 2026  
Plt Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

  
**WILNA SILVANY, SE.**  
NIP. 19880407 201101 2 003